

Nomor	: 188.4/008/KPTS/414.102.025/2023
Revisi Ke	: 07
Berlaku Tgl	: 03/04/2023



**KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS PELAYANAN YANG**  
**DISEDIAKAN DI UOBF PUSKESMAS SEMANDING**

**Ditetapkan**  
**Kepala UOBF Puskesmas Semanding**



**drg. S U L E M I**  
**NIP. 19650330 199203 2 005**

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS KESEHATAN, P2 DAN KB**  
**UOBF PUSKESMAS SEMANDING**  
Jalan Hayam Wuruk Kec. Semanding Telp (0356) 328144  
Email : puskesmas\_semanding@yahoo.co.id  
Tuban 62381



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UOBF PUSKESMAS SEMANDING**  
Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Semanding Telepon (0356) 328144  
Email: puskesmas\_semanding@yahoo.co.id  
**TUBAN 62381**

---

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING  
NOMOR : 188.4/008/KPTS/414.102.025/2023

TENTANG  
PENETAPAN JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN  
DI UOBF PUSKESMAS SEMANDING

KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING,

- Menimbang :
- a. bahwa puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional;
  - b. bahwa puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Puskesmas harus melakukan identifikasi dan menyampaikan informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien/pengguna layanan;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan keputusan kepala UOBF Puskesmas Semanding tentang penetapan jenis pelayanan yang disediakan di UOBF Puskesmas Semanding;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Gawat Darurat;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenkes RI No. 74 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 28. Standar Usaha Puskesmas: No. KBLI: 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649-686)
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang HIV, AIDS dan IMS;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter gigi;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor RI No 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
41. SE Dirjen P2P Kemenkes RI No.

HK.02.02/I/1564/2018 tentang Penatalaksanaan  
ODHA untuk Eliminasi HIV AIDS Tahun 2018;  
42. Inpres No 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jenis Pelayanan Yang Disediakan di UOBF  
Puskesmas Semanding.
- KEDUA : Jenis pelayanan yang disediakan di UOBF Puskesmas  
Semanding sebagaimana dimaksud diktum kesatu  
tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan  
Kepala Puskesmas Semanding Nomor  
188.4/003/KPTS/414.102.025/2022 tentang Jenis  
Pelayanan yang Disediakan di UOBF Puskesmas Semanding  
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semanding  
pada tanggal : 03 April 2023



KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING,

S U L E M I

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
 SEMANDING NOMOR  
 188.4/002/KPTS/414.102.025/2023  
 TENTANG  
 JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI  
 UOBF PUSKESMAS SEMANDING

---

JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN  
 DI UOBF PUSKESMAS SEMANDING

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN PELAYANAN
I	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial :	
	a. Pelayanan Promosi Kesehatan	1. Pengkajian PHBS pada Rumah Tangga, sekolah, dan Pondok Pesantren 2. Pengembangan UKBM 3. Pembinaan Desa Siaga 4. Penyuluhan dalam Gedung dan Luar Gedung 5. Pembinaan Taman Posyandu
	b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Pelayanan penyehatan Sarana Air Minum 2. Pelayanan Penyehatan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) 3. Pembinaan Tempat Fasilitas Umum (TFU) 4. Pelayanan penyuluhan dan pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
	c. Pelayanan Kesehatan Keluarga	1. Pelayanan Kesehatan Ibu 2. Pelayanan Kesehatan Bayi 3. Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah 4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah 5. Pelayanan Kesehatan Remaja 6. Pelayanan Kesehatan Lansia 7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
	d. Pelayanan Gizi	1. Pelayanan Gizi masyarakat 2. Pelayanan Penanggulangan Gangguan Gizi 3. Pemantauan Status Gizi
	e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian	1. Pelayanan Diare 2. Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN PELAYANAN
	penyakit	B pada Ibu Hamil 3. Pelayanan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) 4. Pelayanan Kusta 5. Pelayanan TBC 6. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS 7. Pelayanan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Malaria 8. Pelayanan Imunisasi 9. Pelayanan Pengamatan Penyakit (surveillance epidemiology) 10. Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak Menular 11. Pelayanan Kesehatan Jiwa
	f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)
II	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan :	
	a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	1. Penyuluhan/pemeriksaan gigi dan mulut di PAUD dan T 2. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di Posyandu 3. Pemeriksaan Gigi SD/MI
	b. Pelayanan Kesehatan Tradisional & Komplementer	Pelayanan Kesehatan Tradisional & Komplementer
	c. Pelayanan Kesehatan Olahraga	1. Pengukuran Kebugaran Jasmani CJH 2. Pengukuran Kebugaran Jasmani Karyawan Puskesmas 3. Pengukuran Kebugaran Jasmani karyawan instansi 4. Pengukuran Kebugaran Jasmani Anak Sekolah Dasar 5. Pembinaan kelompok Olahraga
	d. Pelayanan Kesehatan Kerja	1. Pembentukan Pos UKK 2. Pembinaan Pos UKK

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN PELAYANAN
	e. Pelayanan Kefarmasian	Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat tentang obat pada Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat
	f. Pelayanan MATRA	Pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji
III	Upaya Kesehatan Perorangan :	
	a. Pelayanan Tindakan	Pelayanan tindakan pada pasien yang gawat darurat
	b. Pelayanan Pemeriksaan Umum (Pasien Usia > 5 tahun hingga < 60 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Medis</li> <li>2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter</li> <li>3. Asuhan Keperawatan</li> </ol>
	c. Pelayanan Pemeriksaan Lansia (Pasien Usia > 60 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Medis</li> <li>2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter</li> <li>3. Asuhan Keperawatan</li> </ol>
	d. Pelayanan Pemeriksaan Khusus	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan TB, Kusta, dan HIV
	e. Pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut	Pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut
	f. Pelayanan KIA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>2. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas</li> <li>3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>4. Ante Natal Care Terpadu</li> <li>5. USG Kehamilan</li> </ol>
	g. Pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan KB</li> <li>2. Pelayanan Konsultasi KB</li> <li>3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin</li> </ol>
	h. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)	Pelayanan MTBS
	i. Pelayanan Imunisasi	Pelayanan imunisasi
	j. Pelayanan Persalinan	Pelayanan Persalinan
	k. Pelayanan Gizi	Pelayanan Konsultasi gizi

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN PELAYANAN
	1. Pelayanan Konsultasi Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Pelayanan Konsultasi Upaya Berhenti Merokok (UBM)
	m. Pelayanan Laboratorium	Pelayanan pemeriksaan laboratorium sederhana
	n. Pelayanan Kefarmasian	Pelayanan Kefarmasian



KEPALA UQBF PUSKESMAS SEMANDING,

S U L E M I